

UPAYA PENINGKATAN PERAN BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA DALAM PROSES LEGALITAS GURU TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN

Norma Juainah¹, Hatta Azzuhri², Saipul Anwar³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia^{1,2,3}

Email : normajuainah_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Proses digitalisasi legalitas guru melalui situs Emis masih belum sepenuhnya mencakup semua guru agar terdaftar dalam data resmi Kementerian Agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi BKPRMI dalam proses legalisasi Guru dan Unit Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Kanak-kanak Al-Quran di Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, pengurus DPK BKPRMI, dan tiga lembaga TPA/TKA. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang mencakup tiga langkah: pengkondensian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa BKPRMI memiliki beberapa fungsi, seperti melakukan sosialisasi kepada TPA/TKA mengenai pengajuan IJOP (Izin Operasional) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) kepada Kementerian Agama, serta menyelenggarakan pelatihan dan penstandaran untuk guru TKA-TPA belum optimal dalam proses legalitas guru dan unit TKA-TPA. Diperlukan sosialisasi secara berkala dan berlanjut untuk kecamatan-kecamatan sehingga TPA/TKA di Kabupaten Ogan Ilir. Peran BKPRMI ini telah dituangkan dalam program kerja yang mereka lakukan. Namun dengan keterbatasan sarana, waktu dan sumber daya maka peran yang mereka jalankan belum sepenuhnya dijalankan dengan efektif.

Kata Kunci: Peran, Legalitas, dan Guru

ABSTRACT

The process of digitizing teacher legality through the Emis website still does not fully cover all teachers so that they are registered in the official data of the Ministry of Religion. This article aims to analyze BKPRMI's contribution to the process of legalizing Al-Quran Teachers and Education Park Units/Al-Quran Kindergartens in Ogan Ilir Regency. The research method applied was qualitative with a case study approach, involving the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency, the BKPRMI DPK management, and three TPA/TKA institutions. Data collection was carried out through interviews and observations. Data analysis was carried out using an interactive model which included three steps: data condensing, data presentation, and drawing conclusions. Research findings indicate that BKPRMI has several functions, such as providing outreach to TPA/TKA regarding the application for IJOP (Operational Permit) and BOP (Educational Operational Assistance) to the Ministry of Religion, as well as organizing training and

standardization for TKA-TPA teachers has not been optimal in the legal process for teachers and TKA units. -TPA. Regular and continuous outreach is needed to the sub-districts so that TPA/TKA in Ogan Ilir Regency. BKPRMI's role has been outlined in the work program they carry out. However, with limited facilities, time and resources, the roles they carry out have not been fully carried out effectively.

Keywords: *Role, Legality, and Teacher*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik bagi masyarakat saat ini menjadi hal prioritas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Sesuai dengan pengantar UUD Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "...Pemerintah Republik Indonesia bertugas untuk membela seluruh rakyat Indonesia dan segala wilayah Indonesia, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, mendidik kehidupan masyarakat, dan turut berperan dalam menciptakan kedamaian global, yang berlandaskan kebebasan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial..." (Pemerintah Indonesia, 2017). Salah satu pelayanan publik yang cukup menjadi sorotan dan menjadi hal kan dalam hal pelayanan yaitu pada bidang pendidikan. Pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional dan nasional tidak dapat dianggap remeh, karena semua kegiatan pendidikan mempunyai dampak langsung secara keseluruhan. Tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya serius untuk mempersiapkan, memperkuat, dan mengembangkannya dengan berbagai cara sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pembangunan

pendidikan selalu menjadi aspek penting dan tidak terpisahkan dalam upaya memajukan bangsa dan negara (Dita Anggraini et al., 2023).

Prioritas yang dapat disorot dari kesejahteraan pengajar dan legalitas suatu lembaga dapat menjadi hal penting dalam kualitas pengajaran pada bidang Pendidikan ini. Melalui otonomi pendidikan yang diterapkan saat ini, pemerintah daerah sebagai solusi permasalahan dekadensi moral di masyarakat khususnya dikalangan pelajar mempunyai kekuatan untuk melakukan transformasi nilai-nilai pendidikan Islam. Adaptasi terhadap tuntutan populasi mayoritas Muslim. Dengan tetap memperhatikan relevansi kebijakan dengan peraturan pemerintah pusat yang diberlakukan sehingga esensinya adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan slogan Kota Santri. Setelah 10 tahun berdirinya kabupaten ini pemerintah mengeluarkan peraturan daerah mengenai wajib baca tulis al-quran yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2014 mengatur tentang Kewajiban Membaca dan Menulis Al-Quran. Tujuan dari

kewajiban untuk belajar Al-Quran bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang beragama Islam adalah untuk menciptakan individu yang sempurna, baik Muslim maupun Muslimah, yang menunjukkan kualitas sepenuhnya sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an (Bupati Ogan Ilir, 2014). Salah satu organisasi Islam yang memiliki perkembangan di Indonesia adalah BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia) yang merupakan gerakan dakwah yang mengorganisir pemuda dan remaja masjid di seluruh Indonesia dengan struktur organisasi dari tingkat nasional atau DPP (Dewan Pengurus Pusat), provinsi atau DPW (Dewan Pengurus Wilayah), kabupaten/kota atau DPD (Dewan Pengurus Daerah), serta hingga tingkat kecamatan atau DPK (Dewan Pengurus Kecamatan). Organisasi ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk pengembangan Islam melalui ukhuwah islamiyah, pelatihan, dan pendidikan Islam yang bersifat nonformal. (Kafi, 2022).

Pada realisasinya saat ini, telah berdiri 225 unit TPA/TKA yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah tenaga pengajar 800 orang. Data ini bersumber dari pendataan yang kami lakukan pada tahun 2023 bersama pengurus BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir. Dari data yang didapatkan masih 60 persen tenaga pengajar yang belum mendapatkan nomor unit. Namun belum semua tenaga pengajar

TPA/TKA yang terdata pada Emis sehingga banyak tenaga pengajar yang mengandalkan honor dari iuran bulanan peserta didik. Pada data SIPDAR-PQ, kecamatan Pemulutan Selatan dalam pendataan belum rapi dan banyak TPA yang terdaftar 2 bahkan 3 kali. Sehingga nomor statistik yang didapat terdapat 2 nomor yang berbeda antara yang mereka dapatkan dengan nomor yang ada pada website SIPDAR-PQ. TPA yang telah mendapatkan nomor statistik pun setelah mendapatkan nomor statistik tidak mengetahui langkah selanjutnya. Sehingga tidak ada tindak lanjut dari perapian data yang sebelumnya dilakukan manual dahulu.

Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana peran BKPRMI dalam pemenuhan legalitas guru dan unit TPA/TKA di Kabupaten Ogan Ilir. Kebutuhan lembaga pendidikan nonformal serupa dengan institusi pendidikan resmi, baik dari aspek infrastruktur seperti gedung untuk belajar maupun suprastruktur yang berhubungan dengan profesionalisme dan kesejahteraan pengajar, kebutuhan santri sampai dengan pengelolaan lembaga (Dita Anggraini et al., 2023). Peranan BKPRMI sangat berpengaruh dalam mengawal proses ketersediaan sarana dan prasarana ini (Khoirunisaa et al., 2022). Sarana dan prasarana yang memadai serta

adanya legalitas guru dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan guru (Manuahe, 2023).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai penerapan peran BKPRMI di wilayah lain (Dita Anggraini et al., 2023; Kafi, 2022; Manuahe, 2023). Namun pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana peran yang telah dijalankan oleh BKPRMI di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana peranan BKPRMI menjalankan perannya dalam proses legalitas guru dan unit TPA/TKA di Kabupaten Ogan Ilir.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sondang P Siagian Pengembangan organisasi dijelaskan dengan berbagai cara oleh para profesional dan pakar, salah satu alasannya adalah karena kerumitannya. Secara fundamental, pengembangan organisasi merupakan suatu usaha yang direncanakan pada tingkat organisasi untuk memperbaiki efektivitas dan/atau memfasilitasi organisasi dalam mencapai tujuannya yang strategis. (Pipit Mulyah, dkk, 2020; Sedarmayanti, 2004).

Pengembangan organisasi mengevaluasi kinerja suatu entitas melalui aspek efisiensi, efektivitas, dan kesehatan. Efisiensi dapat dinilai dengan membandingkan input dan output, yang berhubungan dengan

konsep Minimaks (input minimum dan output maksimum). Efektivitas merujuk pada sejauh mana organisasi berhasil dalam meraih tujuannya, yang berarti keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan yang telah ditentukan. Kesehatan organisasi merupakan hasil dari karakter dan kualitas interaksi antara individu dan organisasi, yaitu hubungan yang bersifat dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. (Bagas et al., 2024).

Perubahan dalam sebuah organisasi adalah faktor penting dalam pertumbuhannya, yang memerlukan keberadaan seorang pemimpin. Karena kualitas suatu organisasi dapat dinilai dari cara seorang pemimpin mengelola, berkomunikasi, mengevaluasi, dan membuat keputusan, maka sosok pemimpin sangat krusial untuk kemajuan dan efektivitas organisasi. (Jannah et al., 2024)

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (Creswell et al., 2007). Metodologi riset ini berlandaskan pada pemikiran postpositivisme yang diterapkan untuk mengamati situasi alami (berlawanan dengan eksperimen). Informasi diperoleh melalui pendekatan wawancara, pencatatan dokumen, dan pengamatan langsung. Data primer diambil dengan melibatkan pihak Kementerian

Agama Kabupaten Ogan Ilir, pengurus DPK BKPRMI dan 3 lembaga TPA/TKA. Data sekunder yang diambil melalui dokumen dan laporan serta buku yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan dengan metode triangulasi (kombinasi), analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif. Data dianalisis melalui model interaktif yang meliputi tiga langkah: pengorganisasian data (data condensation), penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Sebelum data diolah, hasil wawancara ditranskrip untuk mempermudah pemrosesan data, termasuk prosedur triangulasi data. Setelah analisis data selesai, peneliti melakukan validasi data dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan peninjauan kembali tingkat keandalan data yang diperoleh menggunakan instrumen dan jangka waktu yang bervariasi dalam penelitian kualitatif. Dalam menerapkan teknik triangulasi ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dari setiap informan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang dikumpulkan. Sementara itu, teknik triangulasi metode merupakan metode validasi data yang memiliki dua pendekatan, yaitu menilai tingkat kepercayaan temuan penelitian dari teknik

pengumpulan data yang digunakan dan mengevaluasi tingkat keandalan sumber data dengan metode serupa. Dalam menerapkan teknik triangulasi ini, peneliti memverifikasi hasil penelitian dengan metode pengumpulan data yang berbeda, yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Legalitas Guru dan Unit Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Kanak-kanak Al-Quran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (TPA/TKA BKPRMI) Kabupaten Ogan Ilir (Studi pada TPA/TKA Kecamatan Lubuk Keliat dan Pemulutan Selatan) telah diupayakan untuk dapat didata sesuai dengan kebutuhan unit dan tenaga pengajar pada masing-masing daerah. Dalam peraturan daerah tentang wajib baca tulis al-qur'an pada pasal 8 disebutkan bahwa Proses edukasi yang bersifat operasional berada di bawah tanggung jawab para pengajar atau pendidik, sedangkan pengelolaannya secara keseluruhan menjadi kewajiban pemerintah daerah dan secara spesifik menjadi tugas Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, serta lembaga informal lainnya. Meskipun begitu, dalam praktiknya, dukungan baik secara moral maupun materiil dari semua pihak yang terlibat masih

sangat diperlukan sehingga peraturan ini dapat terimplementasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Peran BKPRMI dalam proses Legalitas Guru dan Unit Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Kanak-kanak Al-Quran Kabupaten Ogan Ilir yang akan dilakukan merujuk pada bagaimana mensejahterakan unit dan tenaga pengajar yang dapat bekerja lebih profesional dan dengan jaminan kesejahteraan yang layak. Menurut Pajriah (Jannah et al., 2024), Terdapat 4 aspek yang menjadi dalam analisis peran ini yaitu sebagai berikut :

A. Aspek Sumber Daya Manusia

Pada aspek ini peneliti memperdalam data mengenai skill, pengetahuan dan kesadaran pengurus BKPRMI. Data yang diperoleh bahwa BKPRMI telah melakukan kegiatan Sosialisasi yang telah dilakukan pada 2 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yaitu Kecamatan Lubuk Keliat dan Kecamatan Pemulutan Selatan, namun pada kecamatan lain belum dilakukan secara intensif.

B. Aspek kelembagaan

Berdasarkan keberadaan masing-masing unit di bawah naungan BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir dan juga pemerintah daerah yang secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas

Pendidikan dan Lembaga informal lainnya, maka hasil wawancara menunjukkan bahwa secara teknis masing-masing kecamatan telah berkoordinasi secara berkala dengan pengurus daerah.

C. Aspek Infrastruktur

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam berjalan secara efektifnya suatu lembaga. Mobilisasi Sumber Daya Modal Ini adalah metode mobilisasi sumber daya individu melalui tabungan rutin dan kontribusi sukarela untuk tujuan menciptakan modal sosial. Gagasan ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang unik dan menggabungkan sumber daya tersebut dapat meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi secara signifikan (Setianingsih, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh bahwa BKPRMI dalam menghimpun per kecamatan telah melakukan pendataan secara berkala dalam hal pendataan kebutuhan sarana dan prasarana TPA/TKA.

D. Aspek Tata Kelola

Menurut Moeljatno, prinsip legalitas adalah sebuah norma yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap melanggar atau terkena sanksi pidana kecuali

sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam istilah Latin, ini disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang berarti tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang lebih dulu. Dari pemahaman tentang prinsip legalitas, setidaknya terdapat tiga makna: yang pertama, tidak ada tindakan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman jika belum dinyatakan dalam peraturan yang berlaku. Kedua, dalam penilaian suatu tindakan pidana, analogi tidak boleh diterapkan. Ketiga, ketentuan hukum pidana tidak boleh memiliki efek yang berlaku mundur. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum karena melakukan suatu tindakan jika sebelumnya belum ada undang-undang yang mengaturnya. Kedua pemahaman di atas memiliki inti yang serupa, yakni setiap tindakan seseorang pada dasarnya tidak bisa dikenai sanksi hukum jika tidak ada regulasi yang mengaturnya sebelum tindakan tersebut dilakukan. Di sisi lain, menurut Wirjono Prodjodikoro, ungkapan dalam bahasa Latin tentang prinsip legalitas yang menyatakan *nullum delictum,*

nulla poena sine praevia lege juga diartikan sebagai tidak adanya kejahatan, serta tidak adanya hukuman pidana tanpa adanya lebih dulu undang-undang pidana yang mengaturnya (Khasan, 2017).

Asas legalitas adalah prinsip dasar yang penting dalam hukum pidana. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berkuasa. Namun, di sisi lain, keberadaan asas ini menyulitkan pengakuan terhadap norma-norma hukum yang tidak terdokumentasi dan berkembang secara alami dalam komunitas. Tujuan dari asas legalitas adalah sebagai berikut:

1. Menjaga warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara;
2. Melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah negara;
3. Menjaga kebebasan individu dari perilaku sewenang-wenang;
4. Mencerminkan legal positivism dalam hukum pidana (Bagas, M. C, dkk, 2024).

Secara substansial, asas legalitas memiliki dua peran utama, yaitu fungsi perlindungan yang menjaga warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas dan fungsi pembatasan yang

membatasi kekuasaan otoritas dan/atau kewenangan hakim. Fungsi perlindungan hanya berlaku untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan diadili selama tindakan mereka tidak termasuk dalam kategori mala prohibita (yang bertentangan dengan hukum). Di sisi lain, fungsi pembatasan juga bertujuan untuk melindungi pelaku, sebab pihak berkuasa tidak dapat menuntut pelaku yang melakukan *crimina extra ordinaria* (tindakan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana), walau pun hal tersebut mengakibatkan kerugian signifikan bagi korban. (Hafizah et al., 2022). Aspek tata Kelola menjadi hal penting yang akan dilakukan pendalaman sehingga dapat diperoleh aturan organisasi dan legalitas yang jelas untuk legalitas unit dan tenaga pengajar.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam menjalankan peran proses legalitas guru dan unit, BKPRMI Ogan Ilir melaksanakan kegiatan sosialisasi ke kecamatan, pertama yang bertempat di Kecamatan Lubuk Keliat diikuti oleh berbagai kecamatan karena antusias kecamatan lain yang mau ikut terlibat dalam kegiatan ini, yaitu Kecamatan Indralaya, Indralaya Selatan, Lubuk Keliat, Tanjung Raja, dan Payaraman.

Pada kegiatan ini, di ikuti dengan 40 peserta dari berbagai kecamatan dengan sangat antusias

bahkan mereka menceritakan permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan seputar administrasi, tempat proses pembelajaran, ruangan yang harus disediakan, suasana pembelajaran hingga lingkungan sekitar tempat pembelajaran dengan nasihat keluarga santri serta lingkungan tempat tinggal santri. Bahkan ada yang sampai menangis dalam bercerita mengenai bagaimana mereka bertahan dan kesungguhan mereka dalam mendidik santri yang mereka ajar. Dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPDAR-PQ dan EMIS. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi TPA, mulai dari yang telah daftar sebelumnya lupa password, lupa email, dan lain sebagainya. Dan disini langsung mengundang operator yang ada pada Kementerian Agama Ogan Ilir untuk membantu mereset password dan mencari solusi bersama. Dan dibuatlah grup Whats App untuk kegiatan pendampingan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya dilakukan di Kecamatan Pemulutan Selatan. Pada kecamatan ini para guru dan unit telah menyiapkan data-data yang mau diupload sehingga pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan langsung dalam penggunaan aplikasi. Sebelumnya mereka pernah mendaftar secara manual tetapi ternyata belum terdata dalam aplikasi sehingga mereka perlu input ulang

tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah lengkap yang mereka miliki serta telah membawa perangkat seperti laptop dan Handphone untuk mendaftar. Dalam proses pendaftaran pada SIPDAR-PQ, terdapat beberapa kendala yang dihadapi TPA, mulai dari yang telah daftar sebelumnya lupa password, lupa email, dan lain sebagainya. Dan disini langsung kami komunikasikan dengan operator yang ada pada Kementerian Agama Ogan Ilir untuk membantu mereset pasword dan mencari solusi bersama. Dan dibuatlah grup Whats App untuk kegiatan pendampingan selanjutnya

KESIMPULAN

Peran BKPRMI ini pada aspek sumber daya manusia kelembagaan, tatakelola, infrastruktur yang mereka jalankan belum sepenuhnya dijalankan dengan efektif. Peran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI) Kabupaten Ogan Ilir dalam proses legalitas guru dan unit harus lebih menyeluruh karena sosialisasi yang diterima oleh 2 kecamatan dari total dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga pada aspek tatakelola dinilai belum efektif.

Keberlanjutan program ini sangat diperlukan dan menjadi program yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing pengurus TPQ. Namun agar lebih efektif maka Badan Komunikasi Pemuda

Remaja Masjid Kabupaten Ogan Ilir dapat melakukan kegiatan sosialisasi ke masing-masing kecamatan sehingga dapat lebih termanajemen dengan baik dan pendataannya dapat digunakan oleh kabupaten apabila terdapat bantuan dana bupati atau program bantuan untuk guru ngaji dan TPQ sehingga data base yang telah tersedia lebih terukur dan sesuai dengan data jumlah guru dan TPQ dilapangan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BKPRMI dalam proses legalitas guru dan unit TPA/TKA ini dapat dilaksanakan secara berkala dan berlanjut untuk kecamatan-kecamatan lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Bagas, M. C., Sholikhah, R. A., Faroah, S., & Rahmawati, V. (2024). Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264.
- Dita Anggraini, Akhmad Shunhaji, & Tanrere, S. B. (2023). Optimalisasi Peran Guru Pengabdian Untuk Meningkatkan

- Kualitas Pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory: Sebuah Tinjauan Efektivitas. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(2), 201–216. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i2.212>
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>
- Jannah, A., Harahap, I. M., & Maidiana, M. (2024). Peran Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 37–43. <http://103.20.188.221/index.php/annidhom/article/view/4460>
- Kafi, M. F. (2022). *Peran BKPRMI dalam pengelolaan masjid di Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law). *Jurnal RechtsVinding*, 6(1), 25–25. <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/>
- Khoirunisaa, I., Rusman, & Asrori. (2022). Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal: Eksplorasi Strategi BKPRMI pada Taman Pendidikan Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 7(1), 77–87. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).8679](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).8679)
- Manuahe, R. (2023). Peran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Dalam Membentuk Karakter Remaja Di Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado. *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal*, 4(1).
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Sedarmayanti. (2004). Sistem Politik Indonesia Menuju "Civil Society" (Masyarakat Madani). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 1(2), 51–64. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/196>
- Setianingsih, E. (2019). Peran Pendampingan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambitan Kecamatan Pakel. *Skripsi*, 20–39.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 11, Nomor 1, November 2025

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 26 November 2024, Reviewed 21 Januari 2025, Publish 13 Februari 2025 (19-29)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)